

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi keyakinan semua bangsa di dunia, bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam kemajuan bangsa, investasi dalam pendidikan merupakan hal yang penting dalam kemajuan bangsa. Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warganya untuk memperoleh hak pendidikan masing-masing.

Sejalan dengan tujuan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah membuat Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Melalui UU Sisdiknas ini pemerintah secara tidak langsung menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.²

Tujuan hakiki tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal dan bermutu. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak (*stakeholder*) bidang pendidikan terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam hal ini pihak yang memegang peran penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.³

Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang

¹ Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945

² Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Cet-2*, (Jakarta:Visimedia), 2007, 2

³ Dian Putra Karana, *Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gadingan Wates dan MI Ma'arif Pagerharjo Samigaluh*, Jurnal: Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Volume 4, No 1, April 2016, 64

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.⁴ Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak normal dalam pendidikan. Namun, selama ini masih banyak dari kalangan masyarakat belum bisa berfikir positif menerima anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan tak sedikit dari masyarakat memberikan perlakuan diskriminatif pada anak-anak berkebutuhan khusus.

Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh pemerintah tidak hanya berlaku bagi anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua atau sekedar memenuhi hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih penting lagi demi kesejahteraan anak dan kehidupan dimasa datang.

Mengingat begitu pentingnya pendidikan untuk semua orang termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, maka kemudian pemerintah memunculkan konsep mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini menjadi salah satu solusi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan pendidikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam melanjutkan pendidikan tanpa merasa minder dan pesimis berkumpul dengan anak-anak normal. Dalam UU Sisdiknas pasal 15 dijelaskan tentang pendidikan khusus. Disebutkan bahwa pendidikan khusus adalah pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah memungkinkan sebagai solusi pemerintah dalam bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara operasional hal ini diperkuat dengan peraturan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional,, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 7

pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus.⁵

Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, pasal 1, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.⁶

Pendidikan adalah hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, tanpa terkecuali termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Perintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi orang cacat sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad yaitu terkodifikasi dalam Al Qur'an Surat 'Abasa ayat 1-11:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ
 يَزْكَىٰ ۚ (٢) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ
 (٣) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۚ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكَىٰ ۚ وَأَمَّا
 (٤) مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۚ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۚ (٥) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ (٦)
 كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ (٧)

⁵ Mohammad Taqdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, Cet-III, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media), 2016, 20

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa

Artinya: ”Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling (1) karena telah datang seorang buta kepadanya (2) tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) (3) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat baginya (4) adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (5) maka kamu melayaninya (6) padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman) (7) dan adapun yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) (8) sedang ia takut kepada (Allah) (9) maka kamu mengabaikannya (10) sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan (11)”

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk tidak memberi penghususan kepada seseorang dalam memberikan peringatan tetapi ia harus bersikap sama dalam berhadapan dengan orang yang mulia atau orang yang lemah, terhadap fakir maupun kaya, terhadap pembesar maupun rakyat jelata, terhadap kaum pria atau wanita, terhadap yang kecil maupun yang besar. Dalam Al Qur’an surat ‘Abasa tersebut mengisyaratkan bahwa siapapun layak mendapatkan pendidikan, tidak memandang status maupun bentuk fisik.

Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TK-LB). Sementara itu jumlah dan lokasi SLB dan TK-LB masih terbatas, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir diseluruh daerah. Hal ini yang mendorong munculnya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua anak (*Education for All*) dengan fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemisahan. Sekolah regular dengan menyediakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah,

membangun masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.⁷

Model yang diberikan pada sekolah inklusi ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan keterbatasan dengan menggunakan prinsip *education for all*.⁸ Layanan pendidikan ini diselenggarakan pada sekolah-sekolah reguler. ABK belajar dengan anak-anak normal lainnya pada kelas reguler dengan kelas dan guru yang sama juga, namun yang menjadi perbedaan terdapat guru khusus yang mendampingi anak berkebutuhan khusus yang merasa kesulitan dalam belajar. Semua anak diperlakukan dan memiliki hak maupun kewajiban yang sama dengan anak-anak normal lainnya.

Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), membutuhkan strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Model pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru disekolah, ditujukan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalan kemampuan diri peserta didik yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi ini terdiri dari empat ranah yang perlu diukur meliputi kompetensi fisik, kompetensi afektif, kompetensi sehari-hari dan kompetensi akademik. Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif adalah kurikulum yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang di perlukan adalah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal.

Peran seorang pendidik dalam pendidikan adalah mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat

⁷ Vitri Dyah Herawati, *Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi*, Jurnal: Pengabdian Masyarakat, Volume 1, No. 1, Desember 2016, 39-40

⁸ Aqila Smart, *Anak Cacat bukan Kiamat Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Katahati), 2010, 104

yang dimilikinya. Seorang guru dalam pembelajaran inklusif lebih ditekankan pada kemampuannya dalam mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga harus memiliki kompetensi mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik yang memiliki perbedaan yang beragam dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik.

Dalam penyelenggaraan sekolah inklusi perlu adanya integrasi antara seluruh pihak sekolah, agar dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik. Pada awal di gulirkannya pendidikan inklusi di Indonesia, sambutan dan apresiasi masyarakat sangat luar biasa, sehingga implementasinya berkembang cepat sampai ke pelosok negeri. Sayangnya, karena beberapa faktor, terutama kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah, membuat implementasi pendidikan inklusi di Indonesia tidak maksimal dan menemui berbagai masalah dan hambatan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sekolah inklusi berdasarkan persepsi dari guru dalam hal ini adalah: 1) Guru, hal yang paling utama yang banyak dikeluhkan adalah kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK), kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK, guru kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar, dan latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai. 2) Orang tua, permasalahan yang muncul terkait orang tua yang paling banyak dikeluhkan oleh guru adalah kepedulian orang tua terhadap penanganan ABK kurang, pemahaman orang tua tentang ABK kurang, orang tua merasa malu sehingga anak disekolahkan di sekolah umum, dan toleransi orang tua siswa reguler terhadap anak ABK kurang. 3) Siswa, permasalahan yang muncul terkait siswa yang dikemukakan guru adalah kesulitan dalam mengikuti pelajaran, sikap ABK yang sulit diatur, dan permasalahan siswa reguler terhadap ABK. 4) Manajemen sekolah, masalah yang muncul terkait manajemen sekolah yang dikemukakan guru adalah belum siapnya sekolah dengan program inklusi, dan proses KBM yang belum berjalan secara maksimal. 5) Pemerintah, permasalahan yang terkait pemerintah yang dikemukakan guru adalah perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan sekolah inklusi kurang, kebijakan terkait pelaksanaan sekolah inklusi belum jelas, belum adanya modifikasi kurikulum khusus sekolah inklusi, kurangnya pelatihan terkait sekolah inklusi kepada guru,

program yang dilakukan pemerintah belum berkelanjutan dan belum adanya lembaga khusus yang menangani pelatihan pendamping ABK.⁹

Salah satu sekolah di kabupaten Pati yang menerapkan pendidikan inklusi adalah SD Negeri Langenharjo 02. SD Negeri Langenharjo 02 merupakan sekolah dasar yang menerapkan sistem pendidikan inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan dengan anak-anak yang normal lainnya. Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas inklusi disamakan dengan anak-anak normal lainnya, namun dalam porsi materi yang disampaikan disesuaikan dengan jenis ABK yang ada di sekolah ini.

Selain itu dalam penerapan pendidikan inklusif di SD Negeri Langenharjo 02, adalah tidak adanya guru pendamping khusus (GPK) yang mendampingi anak ABK di dalam kelas, yang ada hanya guru kelas sekaligus sebagai guru pendamping. kurangnya kemampuan guru dalam memahami anak ABK, serta kurangnya kemampuan guru dalam mengelola kelas saat pembelajaran. Sehingga guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga kurangnya pelatihan guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar dan memahami anak ABK pada kelas inklusi. menyebabkan guru kurang mampu mengembangkan model pembelajaran dalam proses pembelajaran untuk ABK yang dapat membantu proses belajar mengajar.¹⁰

Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti proses pembelajaran peserta didik ABK di SD Negeri Langenharjo 02 Pati. Maka peneliti memilih judul **“Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi (SDN Langenharjo 02 Pati)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menetapkan pendidikan berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi, aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang

⁹ Nissa Tarnoto, *Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD*, Jurnal: Humanitas, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Vol 23, No.1, 55-56

¹⁰ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Siti Shokibah selaku guru di SDN Langenharjo 02 Pati, pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 09.36 WIB

berinteraksi dengan sinergis.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini di fokuskan pada Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi (SDN Langenharjo 02 Pati).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi SDN Langenharjo 02 Pati?
2. Apa saja faktor penghambat dalam proses pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi SDN Langenharjo 02 Pati?
3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan yang ada dalam proses pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi SDN Langenharjo 02 Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi SDN Langenharjo 02 Pati
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi SDN Langenharjo 02 Pati
3. Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi hambatan yang ada dalam proses pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi SDN Langenharjo 02 Pati

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Secara Teoritis
 - Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka usaha-usaha dalam mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya pada bidang penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Inklusi
2. Secara Praktis
 - a. Bagi kepala Sekolah/ Madrasah

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), 2013, 285

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi kepala Sekolah/ Madrasah dalam menetapkan kebijakan untuk lebih mengembangkan potensi, kemampuan dan keterampilan guru khususnya dalam proses belajar mengajar di kelas inklusi.

b. Bagi Guru Kelas (Guru Pendamping)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan khususnya dalam proses pembelajaran dikelas inklusi

c. Bagi Peserta didik SDN Langenharjo 02 Pati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terutama dalam interaksi sosial ketika proses pembelajaran dikelas inklusi.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri dari beberapa Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

bagian yang di bahas di bab I berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

pada bagian yang dibahas di bab II, ini berisi kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian yang dibahas pada bab III adalah jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian yang dibahas pada bab IV ini yaitu gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian

BAB V PENUTUP

Bagian yang di bahas pada bab V adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan Saran.